



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018**



**BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI BALI
TAHUN 2019**

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”

Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu, salam prajawibawa, puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan : Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

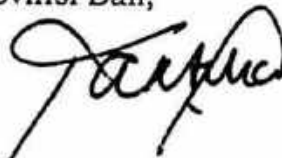
LAKIP sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar bidang dan antar instansi terkait serta diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi narasumber. Mudah-mudahan LAKIP Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.

Terima kasih pula kami sampaikan kepada semua pihak khususnya seluruh staf Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali atas selesainya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali Tahun 2019.

Om Cantih, Cantih, Cantih Om

Denpasar, Januari 2019

Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Bali,



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19680613 199403 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
GAMBARAN UMUM.....	4
A.Latar Belakang.....	4
B. Maksud dan Tujuan	6
C. Ruang Lingkup.....	6
GRAFIK ANGGARAN	10
GRAFIK PERSENTASE	11
DATA KEGIATAN DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016.....	12
DATA KEGIATAN DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017.....	14
DATA KEGIATAN DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018.....	16
PENUTUP.....	18
LAMPIRAN	19

GAMBARAN UMUM

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Di samping Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Sehubungan dengan itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya dijabarkan (terakhir) dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Dengan demikian, menjadi kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan serta pencapaian kinerjanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian juga halnya dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali tahun 2018, merupakan wujud pertanggungjawaban mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Biro dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan LAKIP Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali tahun 2018 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
9. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Permendagri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementrian dalam Negeri.
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali;

16. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali;

B. Maksud dan Tujuan

1. LAKIP ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali berupa kegiatan Rutin dan Pembangunan selama Tahun Anggaran 2018.
2. Sebagai evaluasi hasil Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan maupun kegiatan yang belum terlaksana sesuai rencana, serta kendala yang dihadapi untuk dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.
3. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bidang Pembangunan Hukum.

C. Ruang Lingkup

Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah membantu Gubernur dalam pembangunan hukum di Provinsi Bali dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan instansi pemerintah berupa pembuatan produk hukum, bantuan hukum, dokumentasi hukum dan informasi hukum.

a) Tugas Pokok

Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah Mempunyai tugas Membantu Gubernur dalam pembangunan hukum di Provinsi Bali dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan instansi pemerintah berupa pembuatan produk hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum.

b) Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Biro Hukum dan HAM mempunyai tugas pokok **membantu Gubernur dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang hukum**. Adapun fungsi yang

diemban oleh Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan pembahasan perumusan rancangan produk hukum;
2. Melakukan evaluasi dan kajian hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan produk hukum;
4. Melaksanakan program Strategis Rencana Aksi Nasional HAM;
5. Mengkoordinasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan HAM;
6. Melakukan advokasi dan upaya hukum terhadap permasalahan yang timbul;
7. Mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota;
8. Menyiapkan bahan pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
9. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan mempublikasikan serta mendokumentasikan produk hukum;
10. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum;
11. Mengolah bahan, data, dan menyiapkan rumusan Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali.

c) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Lebih lanjut secara rincian susunannya sebagai berikut:

- Kepala Biro Hukum dan HAM.
- Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri dari :
 1. Kepala Sub. Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
 2. Kepala Sub. Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan;
 3. Kepala Sub. Bagian Pengkajian Produk Hukum.

- Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM terdiri dari :
 1. Kepala Sub. Bagian Litigasi;
 2. Kepala Sub. Bagian Non Litigasi;
 3. Kepala Sub. Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia.
- Kepala Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum terdiri dari :
 1. Kepala Sub. Bagian Dokumentasi Hukum;
 2. Kepala Sub. Bagian Penyuluhan Hukum;
 3. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Biro.

Dalam hal pelaksanaan tugas pokok Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali tahun 2018, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 67 orang dengan status :

- PNS : 33 orang
- Non PNS : 34 orang
- Jumlah : 67 orang

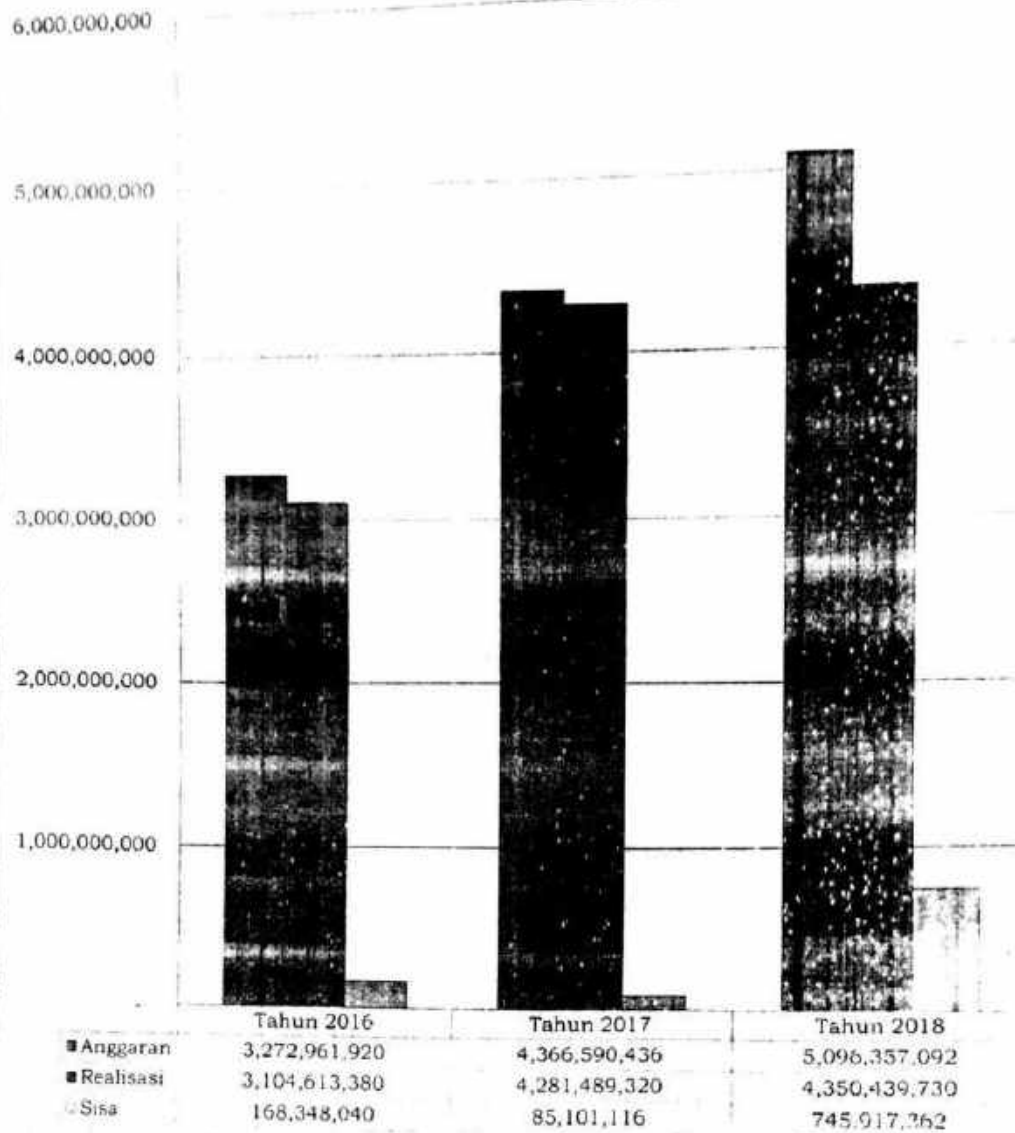
berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	13
2	S1	16
3	D3	-
4	SLTA	4
5	SLTP	-
6	SD	-
JUMLAH		33

GRAFIK ANGGARAN

Anggaran, Realisasi dan Sisa



GRAFIK PERSENTASE

TAHUN ANGGARAN	PAGU	%	REALISASI	%
2016	3.272.961.920	33,41	3.104.613.380	27,49
2017	4.366.590.436	16,71	4.281.489.320	1,61
2018	5.096.357.092	39,70	4.350.439.730	-
2019	7.119.406.480	-	-	-

Anggaran

- Anggaran pada Tahun 2017 meningkat sebesar (33,41%) dari Anggaran Tahun 2016;
- Anggaran pada Tahun 2018 meningkat sebesar (16,71%) dari Anggaran Tahun 2017;
- Anggaran pada Tahun 2019 meningkat sebesar (39,70%) dari Anggaran Tahun 2018;

Realisasi

- Realisasi pada Tahun 2017 meningkat sebesar (37,91%) dari Anggaran Tahun 2016;
- Realisasi pada Tahun 2018 meningkat sebesar (1,61%) dari Anggaran Tahun 2017;

**DATA KEGIATAN DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2016**

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa (Rp.)	Fisik			Satuan
					Target	Realisasi	%	
BELANJA LANGSUNG								
A. Program Pengembangan Produk Hukum	1.239.299.770	1.195.973.000	96,50	43.326.770			100	
1. Penyusunan Raperda	685.300.000	671.934.900	98,05	13.365.100	4	12	100	raperda
2. Penyusunan Pergub dan Keppub	100.000.000	94.434.100	94,43	5.565.900	1.200	2.127	100	buah
3. Evaluasi Produk Hukum	100.000.000	97.154.200	97,15	2.845.800	2	2	100	perda
4. Harmonisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	29.508.000	27.942.500	94,69	1.565.500	400	525	100	NPHD
5. Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota	67.816.500	63.589.300	93,77	4.227.200	24	33	100	perda
6. Peningkatan Pelayanan DIH	119.826.070	117.033.500	97,67	2.792.570	600	600	100	PH
7. Menghimpun dan Menyebarkan Produk Hukum Pusat dan Daerah	86.849.200	80.014.000	92,13	6.835.200	404	404	100	buku
8. Mengupdate Data/Naskah Produk Hukum	50.000.000	43.870.500	87,74	6.129.500	250	250	100	data
9. Penyuluhan dan Sosialisasi Produk Hukum	0	0	0	0	0	0	0	orang
B. Program Bantuan Hukum	1.047.440.000	954.110.180	91,09	93.329.820			100	
1. Penanganan Perkara	1.047.440.000	954.110.180	91,09	93.329.820	12	17	100	perkara
C. Program Pembinaan Hukum dan HAM	108.838.600	106.388.200	97,76	2.450.400			100	
1. Rakor Rencana Aksi Daerah HAM	41.581.650	40.688.750	97,80	892.900	40	37	93	orang
2. Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota	67.256.950	65.719.450	97,71	1.537.500	8	120	100	raperda

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa (Rp.)	Fisik			Satuan
					Target	Realisasi	%	
BELANJA LANGSUNG								
D. Program Peningkatan Kapasitas SDA	423.753.480	409.754.200	96,70	13.999.280			100	
1. Peningkatan Pengetahuan Pejabat dalam Penanganan Sengketa Hukum	151.351.980	141.565.700	93,53	9.786.280	40	40	100	orang
2. Peningkatan Pengetahuan Aparatur terhadap Tata Usaha Negara	47.401.500	45.377.100	95,73	2.024.400	40	40	100	orang
3. Pelatihan Teknis JDII	125.000.000	123.564.100	98,85	1.435.900	36	36	100	orang
4. Rapat Koordinasi Hukum dan HAM	100.000.000	99.247.300	99,25	752.700	30	30	100	orang
E. Program Penegakan Hukum dan HAM	88.139.950	83.236.000	94,44	4.903.950			100	
1. Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	88.139.950	83.236.000	94,44	4.903.950	6	14	100	raperda
E. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	136.155.500	130.071.500	95,53	6.084.000			100	
1. Penyediaan ATK	26.655.500	26.321.500	98,75	334.000	12	12	100	jenis
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.500.000	17.500.000	100	0	5	5	100	jenis
3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.000.000	86.250.000	93,75	5.750.000	3	3	100	jenis
G. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	229.334.620	225.080.800	98,15	4.253.820			100	
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	229.334.620	225.080.800	98,15	4.253.820	12	12	100	unit
JUMLAH	3.272.961.920	3.104.613.880	95,74	168.348.040				

**DATA KEGIATAN DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2017**

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa (Rp.)	Fisik			Satuan
					Target	Realisasi	%	
BELANJA LANGSUNG								
A. Program Pengembangan Produk Hukum	1.281.327.300	1.258.914.158	98,25	401.709.329			100	
1. Penyusunan Raperda	701.468.000	695.118.890	99,09	6.349.110	5	12	100	raperda
2. Penyusunan Pergub	73.470.000	69.831.200	95,05	3.638.800	60	106	100	pergub
3. Pengkajian Produk Hukum Kab./Kota	97.740.500	96.638.916	98,87	1.101.584	25	26	100	perbub/ walikota
4. Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kab./Kota	178.648.800	172.380.929	96,49	6.267.871	50	568	100	PH
5. Penyusunan Produk Hukum Penetapan	135.000.000	132.505.407	98,15	2.494.593	1600	2510	100	kab/kota
6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab./Kota	95.000.000	92.439.416	97,30	2.560.584	6	10	100	kepgub Raperda kab/kota
B. Program Bantuan Hukum dan HAM	1.787.047.000	1.764.415.065	98,73	291.662.833			83	
1. Harmonisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	30.000.000	28.631.100	95,44	1.368.900	400	400	100	NPHD
2. Penanganan Perkara	1.542.718.000	1.533.976.238	99,43	8.741.762	6	19	100	perkara
3. Pendampingan Hukum	60.000.000	53.573.516	89,29	6.426.484	10	3	33	orang
4. Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah HAM	154.329.000	148.234.211	96,05	6.094.789	25	25	100	orang
C. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	767.358.136	731.459.307	92,40	942.496.199			100	
1. Peningkatan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	202.329.000	199.812.175	98,76	2.516.825	600	600	100	PH
2. Menghimpun dan Menyebarluaskan Produk Hukum Pusat dan Daerah	134.314.416	131.141.741	97,64	3.172.675	400	400	100	Buku

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa (Rp.)	Fisik			Satuan
					Target	Realisasi	%	
3. Pelatihan Teknis JDII	100.329.000	95.641.440	95,33	1.687.560	35	35	100	orang
4. Rapat Koordinasi Hukum dan HAM	170.385.720	150.603.821	88,39	19.781.896	30	30	100	orang
5. Penyuluhan dan Sosialisasi Produk Hukum	160.000.000	154.260.127	96,41	5.739.873	150	150	100	orang
D. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	185.500.000	184.349.000	99,38	28.572.000			100	
1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.000.000	2.965.000	98,83	35.000	1	1	100	paket
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.000.000	25.000.000	100	0	17	17	100	jenis
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.500.000	17.485.000	99,91	15.000	4	4	100	jenis
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.786.000	97,86	214.000	1	1	100	paket
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.000.000	129.113.000	99,32	887.000	2	2	100	paket
E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	345.358.000	342.351.190	99,13	63.535.062			100	
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000	100	0	1	1	100	paket
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	271.200.000	268.981.482	99,18	2.218.518	11	11	100	unit
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000	14.832.500	98,88	167.500	12	12	100	unit
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	49.658.000	49.037.208	98,75	620.792	3	3	100	paket
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Mebeleur	4.500.000	4.500.000	100	0	1	1	100	paket
JUMLAH	4.366.590.436	4.281.489.320	97,58	85.101.116	-	-	100	

**DATA KEGIATAN DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2018**

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa (Rp.)	Fisik			Satuan
					Target	Realisasi	%	
BELANJA LANGSUNG								
A. Program Pengembangan Produk Hukum								
1. Penyusunan Raperda	1.917.901.006	1.514.540.729	80,52	403.360.277	1.766	3.036	100	raperda pergub perbub/ walikota PH kab/kota kepgub Raperda kab/kota
2. Penyusunan Pergub	1.169.462.282	948.583.836	81,11	220.878.446	10	13	100	
3. Pengkajian Produk Hukum Kab./Kota	250.731.325	140.043.413	55,85	110.687.912	75	78	100	
	113.274.333	85.415.316	75,41	27.859.017	25	25	100	
4. Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kab./Kota	100.317.333	90.736.816	90,45	9.580.517	50	50	100	
5. Penyusunan Produk Hukum Penetapan	193.657.400	162.592.035	83,96	31.065.368	1.600	2.860	100	
6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab./Kota	90.458.333	87.169.316	96,36	3.289.017	6	10	100	
B. Program Bantuan Hukum dan HAM	2.029.385.327	1.758.927.201	87,00	270.458.126	449	526	81,25	
1. Harmonisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	35.969.180	20.465.834	56,90	15.503.346	400	477	100	NPHD
2. Penanganan Perkara	1.684.709.172	1.508.124.784	89,52	176.584.388	16	13	81,25	perkara
3. Pendampingan Hukum	81.970.875	74.739.491	91,18	7.231.384	13	13	100	orang
4. Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah HAM	226.736.100	155.597.092	68,62	71.139.008	25/20	23	100	orang
C. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	720.741.927	658.940.038	91,00	61.801.889	1.180	1.192	89,60	
1. Peningkatan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	186.269.130	164.446.262	88,28	21.822.868	600	612	100	PH
2. Menghimpun dan Menyebarkan Produk Hukum Pusat dan Daerah	127.485.432	123.389.432	96,79	4.096.000	400	400	100	Buku

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa (Rp.)	Fisik			Satuan
					Target	Realisasi	%	
3. Pelatihan Teknis JDIIH	104.892.316	84.054.514	80,13	20.837.802	0	0	48,00	orang
4. Rapat Koordinasi Hukum dan HAM	139.593.600	130.519.366	93,50	9.074.234	30	30	100	orang
5. Penyuluhan dan Sosialisasi Produk Hukum	162.501.449	156.530.464	96,33	5.970.985	150	150	100	orang
D. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	58.500.000	56.417.500	96,00	2.082.500	24	24	100	
1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.500.000	0	0	1.500.000	1	1	100	paket
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000	29.949.000	99,83	51.000	17	17	100	jenis
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	100	0	4	4	100	jenis
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.475.000	73,75	525.000	1	1	100	paket
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	4.993.500	99,87	6.500	1	1	100	paket
E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	369.828.832	361.614.262	98,00	8.214.570	28	28	100	
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.500.000	0	0	1.500.000	1	1	100	paket
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	344.828.832	338.129.262	98,06	6.699.570	11	11	100	unit
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	7.000.000	7.000.000	100	0	12	12	100	unit
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15.000.000	14.985.000	99,90	15.000	3	3	100	paket
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Mebelcur	1.500.000	1.500.000	100	0	1	1	100	paket
JUMLAH	5.096.357.092	4.350.439.730	85,00	745.917.362			94,17	

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali tahun 2018 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Bali. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil Evaluasi Internal melalui pengukuran kinerja kegiatan dan capaian target yang telah disusun Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali Tahun 2018, Kinerja Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali termasuk kategori sangat baik dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Meskipun demikian, sistem penilaian kinerja tersebut akan terus dikembangkan sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Indikator kinerja kegiatan dan indikator sasaran juga akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dimasing-masing OPD pelaksana kegiatan di Lingkungan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.

Dalam mewujudkan capaian diatas, banyak hambatan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja di lingkup OPD, meningkatkan etos kerja, penegakan disiplin pegawai, meningkatkan kompetensi aparatur guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Provinsi Bali Tahun 2013 - 2018.

LAMPIRAN

**DAFTAR NAMA DAN JUMLAH PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI BALI**

NO	NAMA PEGAWAI	JENIS KELAMIN	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra,SH,MH 19680613 199403 1 012	L	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Biro Hukum dan HAM
2	Ni Ketut Adiani,SH, MH 19610511 198603 2 005	P	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
3	Luh Gde Aryani Koriawan,SH,M.Si 19750602 200003 2 004	P	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan
4	Desak Nyoman Surati, S.Sos 19621231 198212 2 002	P	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian TU Biro
5	Tjok Istri Srimas Pemayun,SH,MH 19750209 199903 2 009	P	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Pengaturan
6	Cokorda Alit Sudarsana, SH,MH 19721010 199803 1 021	L	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum
7	I.A PT. Swasti Susanthi Widhana,SH,MH 19690721 199603 2 002	P	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum
8	I Gusti Ngurah Oka Suryateja,SH,MH 19681231 198903 1 051	L	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum
9	Agung Herwanto,SH,M.Si 19630315 199603 1 002	L	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Non Litigasi
10	I Putu Suarta,SH,MH 19681010 199403 1 016	L	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian HAM
11	Ngurah Satria Wardana,SH,MH 19770510 200212 1 001	L	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Litigasi
12	Ni Luh Ayu Suasti,SH 19651231 198603 2 157	P	Penata Tk. I (III/d)	Pelaksana
13	I Ketut Budivasi,SH 19611023 200604 1 002	L	Penata Tk. I (III/d)	Pelaksana
14	Desak Made Onik Listiawati,SH 19740404 200801 2 013	P	Penata (III/c)	Pelaksana

1	2	3	4	5
	NAMA PEGAWAI	JENIS KELAMIN	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
15	Ni Luh Putu Sugi Martini,SH 19670331 199203 2 006	P	Penata (III/c)	Pelaksana
16	Komang Sriasih, SH 19720406 199703 2 004	P	Penata (III/c)	Pelaksana
17	Cokorda Putra Suryadarma,SH 19661018 199403 1 009	L	Penata (III/c)	Pelaksana
18	I Wayan Sujana,S.Sos 19740204 200003 1 001	L	Penata (III/c)	Pelaksana
19	Ayu Putu Soka,SH 19660930 200003 2 003	P	Penata (III/c)	Pelaksana
20	Anak Agung Mirah Terisnawati, SH 19770605 200803 2 001	P	Penata (III/c)	Pelaksana
21	Ni Luh Putu Darwati,SH,MH 19750305 201001 2 007	P	Penata (III/c)	Pelaksana
22	Luh Putu Anggreni Wijayanti,SH 19801111 201101 2 005	P	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana
23	Dewi Agung.AP,SH 19740504 200901 2 004	P	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana
24	I Ketut Parwata 19611231 198511 1 019	L	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana
25	Ni Luh Mangku Arini,SH 19691218 199703 2 008	P	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana
26	I Dewa Agung Gede Manu,SH,MH 19770518 199803 1 003	L	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana
27	I Putu Eka Puspitha,SH 19761004 200801 1 001	L	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana
28	I Wayan Muliarta,SH 19820210 200801 1 013	L	Penata Muda (III/a)	Pelaksana
29	Tegar Bagus Albert Sanger,SH 19880414 201503 1 006	L	Penata Muda (III/a)	Pelaksana
30	Putu Iddy Sastrowan,SH 19900423 201503 1 002	L	Penata Muda (III/a)	Pelaksana

NO	NAMA PEGAWAI	JENIS KELAMIN	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4	5
31	I Kadek Suardana 19641223 200604 1 006	L	Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana
32	I Wayan Sumerta 19821109 200901 1 005	L	Pengatur (II/c)	Pelaksana
33	I Made Agus Widnyana 19810323 200901 1 016	L	Pengatur (II/c)	Pelaksana

DIKLAT KEPEMIMPINAN PARA PEJABAT PADA BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROV. BALI

No	NAMA	JABATAN	GOL	DIKLAT YANG SUDAH DILAKSANAKAN	NO SERTIFIKAT	TAHUN LULUS
1	I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra,SH,MH 19680613 199403 1 012	Eselon III	IV/b	PIM TK. IV	4.005/DIKLAT PIM TK.07IV/LAN	2005
				PIM TK. III	16381/DIKLAT PIM TK.III/DPN/2006	2006
				PIM TK. II		2018
2	Ni Ketut Adiani,SH,MH 19610511 198603 2 005	Eselon III	IV/b	ADUM	893.3/1560/ADUM/DIKLAT PROV/1997	1997
				PIM TK. III	00003575/DIKLATPIMTK III/51/5100/LAN/2016	2016
3	Dr. I Made Wiryani, SH,MH 19600815 198102 2 002	Eselon III	IV/b	ADUM SPAMA	12723/ADUM/LAN/1996 4500/SPAMA/LAN/1999	1996 1999
4	I Gusti Ngurah Oka Surya Teja,SH,MH 19681231 198903 1 051	Eselon IV	IV/a	PIM TK. IV	3747/122/DIKLATPIM TK.IV/LAN/2007	2007
5	Tjok Istri Srimas Pemayun,SH,MH 19750209 199903 2 009	Eselon IV	IV/a	PIM TK. IV	2171 / DIKLATPIM TK. IV/LAN/2004	2004
6	Ayu Putu Lilik Handayani,AP,SH,MH 19760205 199412 2 001	Eselon IV	IV/a	PIM TK. IV	2387/ADUM/LAN/1999 1230/ADUM/DIKLAT PROP/1999	1999
7	Agung Herwanto, SH,MH 19630315 199603 1 002	Eselon IV	III/d	ADUM	21337/ADUM/LAN/1998 1886/ADUM/DIKLAT/PROP 1998	1998
8	I Putu Suarta,SH,MH 19681010 199403 1 016	Eselon IV	III/d	PIM TK. IV	00000265/DIKLATPIM TK.IV/51/5100/LAN/2017	2017

	Coronel Putu Sutiasana, SH, MH 19721010 199803 1 021	Eselon IV	IV/a	PIM TK. IV	00003207 / DIKLATPIM TK.IV/7500/012/LAN- PEMPROV BALI/2018	2018
10	Ds.Ny.Surati, S.Sos.M.A.P 19621231 198212 2 002	Eselon IV	IV/a	ADUM	39335/ADUM/LAN/1997 993 3/2330/ADUM/DIKLAT PROP/1997	1998
11	Made Asih Darmayanti,SH,MH 19740808 200003 2 010	Eselon IV	IV/a	PIM TK. IV	11.688/122/DIKLAT PIM TK.IV/LAN/2011	2011
12	Ida Ayu Putu Swasti Susanti Widhana,SH,MH 19690721 199603 2 002	Eselon IV	IV/a	PIM TK. IV	00000586/DIKLATPIM TK. IV/51/5171/LAN/2014	2014
13	I Dewa Gede Agung Saputra,SH,M.Si 19740924 199901 1 001	Eselon IV	IV/a	PIM TK. IV	00007396/DIKLATPIM TK.IV/51/517/LAN/2015	2015
14	Ngurah Satria Wardana,SH,MH 19770510 200212 1 001	Eselon IV	III/c	PIM TK. IV	0003224/DIKLATPIM TK.IV/7500/012/LAN- PEMPROV BALI/2018	2018

**RENCANA KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN Gaji BERKALA, SATYA LENCANA KARYA SATYA, Pensiun
PADA BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI BALI TAHUN 2019**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	KENAIKAN PANGKAT	KENAIKAN GAJI BERKALA	SATYA LENCANA KARYA SATYA
1	Ni Ketut Adiani, SH.MH 19610511 198603 2 005	Pembina Tk. I (IV/b)			
2	Tjok Istri Srimas Pemayun, SH,MH 19750209 199903 2 009	Pembina (IV/a)		1/3/2019	
3	Cokorda Alit Sudarsana, SH.MH 19721010 199803 1 021	Pembina (IV/a)			√
4	Agung Herwanto,SH,M.Si 19630315 199603 1 002	Pembina (IV/a)			√
5	I Putu Suarta,SH,MH 19681010 199403 1 016	Penata Tk. I (III/d)		1/3/2019	√
6	Ni Luh Ayu Suasti,SH 19651231 198603 2 157	Penata Tk. I (III/d)		1/3/2019	√
7	I Ketut Budiayasa,SH 19611023 200604 1 002	Penata Tk. I (III/d)		1/4/2019	√
8	Desak Made Onik Listyawati, SH 19740404 200801 2 013	Penata (III/c)			√
9	Ni Luh Putu Sugi Martini.SH 19670331 199203 2 006	Penata (III/c)		1/3/2019	

10	Cekorda Putra Suryadarma, SH 19661018 199403 1 009	Penata (III/c)		1/4/2019		
11	I Wayan Sujana, S.Sos 19740204 200003 1 001	Penata (III/c)		1/3/2019		
12	Luh Putu Anggreni Wijayanti, SH 19801111 201101 2 005	Penata Muda Tk. I (III/b)	1/4/2019	1/1/2019		
13	Ayu Putu Soka, SH 19660930 200003 2 003	Penata (III/c)		1/3/2019	√	
14	Dewi Agung.AP, SH 19740504 200901 2 004	Penata Muda Tk. I (III/b)		1/4/2019	√	
15	Ni Luh Mangku Arini, SH 19691218 199703 2 008	Penata Muda Tk. I (III/b)			√	
16	I Dewa Agung Gede Manu, SH.MH 19770518 199803 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	1/4/2019	1/3/2019	√	
17	I Putu Eka Puspitha, SH 19761004 200801 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	1/10/2019	1/4/2019	√	
18	I Wayan Muliarta, SH 19820210 200801 1 013	Penata Muda (III/a)	1/10/2019	1/4/2019	√	
19	Tegar Bagus Albert Sanger, SH 19880414 201503 1 006	Penata Muda (III/a)	1/4/2019	1/3/2019		
20	Putu Edy Sastrawan, SH 19900422 201503 1 002	Penata Muda (III/a)	1/4/2019	1/3/2019		

	19641223 200604 1 006	Pengatur Tk. I (II/d)		1/4/2019	4	
22	I Made Agus Widnyana	Pengatur (II/c)		1/10/2019		
	19810323 200901 1 016					
23	Any Pujiati, SH	Penata (III/c)			4	
	19720826 199803 2 008					
24	I Ketut Parwata	Penata Muda Tk. I (III/b)		1/11/2018		1/1/2020
	19611231 198511 1 019					

REALISASI KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN GAJI BERKALA, SATYA LENCANA KARYA SATYA, PENSIUN
PADA BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI BALI TAHUN 2018

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	KENAIKAN PANGKAT	KENAIKAN GAJI BERKALA	SATYA LENCANA KARYA SATYA	PENSIUN
1	I G.A.K. Kartika Jaya Scputra, SH,MH 19680613 199403 1 012	Pembina Tk. I (IV/b)		1/3/2018		
2	Luh Gde Aryani Koriawan, SH,M.Si 19750602 200003 2 004	Pembina (IV/a)		1/3/2018		
3	Ni Ketut Adiani, SH.MH 19610511 198603 2 005	Pembina Tk. I (IV/b)		1/3/2018		
4	Made Asih Darmayanti,SH,M.Si 19740808 200003 2 010	Pembina (IV/a)		1/3/2018		
5	Cokorda Alit Sudarsana, SH.MH 19721010 199803 1 021	Pembina (IV/a)	1/10/2018			
6	Desak Nyoman Surati, S.Sos 19621231 198212 2 002	Pembina (IV/a)	1/4/2018	1/12/2018		
7	I A.PT. Swasti Susanthi Widhana, SH,MH 19690721 199603 2 002	Pembina (IV/a)		1/3/2018	7/8/2018	
8	I Gusti Ngurah Oka Suryateja, SH,MH 19681231 198903 1 051	Pembina (IV/a)		1/3/2018		
9	Agung Herwanto,SH,M.Si 19630315 199603 1 002	Pembina (IV/a)	1/10/2018	1/3/2018		

	19770510 200212 1 001		1/10/2018			
11	I Ketut Budiya,SH	Penata Tk. I (III/d)	1/4/2018			
	19611023 200604 1 002					
12	Desak Made Onik Listyawati, SH	Penata (III/c)		1/3/2018		
	19740404 200801 2 013					
13	Komang Sriasih, SH	Penata (III/c)		1/3/2018	7/8/2018	
	19720406 199703 2 004					
14	Cokorda Putra Suryadarma,SH	Penata (III/c)	1/4/2018		7/8/2018	
	19661018 199403 1 009					
15	I Wayan Sujana, S.Sos	Penata (III/c)	1/10/2018			
	19740204 200003 1 001					
16	Ayu Putu Soka, SH	Penata (III/c)	1/10/2018			
	19660930 200003 2 003					
17	I Ketut Parwata	Penata Muda Tk. I (III/b)		1/11/2018		
	19611231 198511 1 019					
18	Ni Luh Mangku Arini,SH	Penata Muda Tk. I (III/b)		1/3/2018		
	19691218 199703 2 008					
19	I Kadek Suardana	Pengatur Tk. I (II/d)	1/4/2018			
	19641223 200604 1 006					
20	I Wayan Sumerta	Pengatur (II/c)		1/8/2018		
	19821109 200901 1 005					

21	I Wayan Sugiada, SH.MH 19651231 198603 1 175	Pembina Tk. I (IV/b)		1/1/2018		
22	Dr. Made Wiryani, SH.MH 19600815 198102 2 002	Pembina Tk. I (IV/b)		1/2/2018		
23	Ni Ketut Kesumawati, SH 19720927 200701 2 014	Penata Muda Tk. I (III/b)		1/4/2018	7/8/2018	
24	Any Pujiati, SH 19720826 199803 2 008	Penata (III/c)		1/3/2018		
25	Ni Ketut Suartini, Sm.hk 19590923 198503 2 008	Penata Tk. I (III/d)			7/8/2018	
26	I Gusti Ayu Sri Wardani, SH 19600420 198512 2 002	Penata Tk. I (III/d)				1/5/2018